# *ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION AND WORK SAFETY OF HEALTH WORKERS IN INDONESIA*

# ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA

**Muhammad Ishaq Alkays**

[**muhammadishaq@iblam.ac.id**](mailto:muhammadishaq@iblam.ac.id)

**Pita Permatasari**

[**pittapermatasari@iblam.ac.id**](mailto:pittapermatasari@iblam.ac.id)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM  
Jl. Kramat Raya No.25 RT 3 RW 2, Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Healthcare professionals, like other employees, are entitled to legal protection under general labor regulations. This implies that their employment relationship with hospitals, which act as their employers, must comply with the applicable laws and regulations. The specific provisions governing this relationship are already established in various legal instruments, including the Law on Health Personnel (Law No. 36 of 2009), the Law on Hospitals (Law No. 44 of 2009), the Law on Health Workers (Law No. 36 of 2014), and other relevant healthcare legislation.*

*This journal article utilized a normative juridical approach, complemented by the collection of secondary data. The decision to use a normative approach was driven by the constraints imposed by the Covid-19 pandemic, which made it difficult to conduct empirical research. The Descriptive Design was chosen as the research design for this study. The data was obtained through an extensive review of existing literature. Qualitative analysis methods were applied to explore the topic of legal protection for healthcare workers.*

***Keywords: Health Workers, Legal Protection, Work Relations***

# Abstrak

Profesional kesehatan, termasuk mereka yang bekerja di rumah sakit, termasuk dalam kategori pekerja yang mendapatkan perlindungan hukum sesuai undang-undang ketenagakerjaan umum. Mereka memiliki perjanjian kerja dengan rumah sakit sebagai pemberi kerja dan wajib tunduk pada ketentuan yang berlaku. Perlindungan hukum ini diatur dalam berbagai undang-undang kesehatan, seperti Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, serta peraturan hukum lainnya yang terkait dengan bidang kesehatan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum preskriptif dengan memanfaatkan data sekunder. Pemilihan pendekatan preskriptif dipengaruhi oleh keterbatasan penelitian empiris dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka yang komprehensif. Analisis kualitatif digunakan untuk menyelidiki isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

# Kata Kunci: Tenaga Kesehatan, Perlindungan Hukum, Hubungan Kerja

1. **Pendahuluan**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Indonesia, 2009b) tentang Kesehatan, tenaga medis mengacu pada individu yang memiliki dedikasi khusus di bidang kesehatan dan telah menjalani pelatihan khusus untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan di bidang tersebut. Dalam beberapa kondisi kesehatan tertentu, diperlukan regulasi yang khusus. Kategori tenaga kesehatan meliputi dokter, bidan, perawat, apoteker, dan profesi kesehatan lainnya. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati sesuai dengan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 (Indonesia, 2009b), Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 (Indonesia, 2009a), dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit (Indonesia, 2014). Perlindungan terhadap hak dan kewajiban ini merupakan bagian integral dari perlindungan hukum yang diwajibkan.

Petugas kesehatan, selain memegang peran profesional dalam bidang kesehatan, juga memiliki status sebagai karyawan. Oleh karena itu, mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku secara umum, terutama dalam kaitannya dengan hubungan kerja mereka dengan rumah sakit sebagai pemberi kerja. Menurut Pasal 1(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Indonesia, 2003) tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja merujuk kepada individu yang bekerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Hak dan kewajiban karyawan juga mendapatkan perlindungan dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut (Indonesia, 2003). Kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja menurut Asyhadie Zaenie pekerjaan yaitu ada yaitu: (Abdussalam, 2002).

1. Perlindungan sosial mencakup upaya untuk melindungi pendapatan dan tingkat kehidupan pekerja, tenaga kerja, serta individu dan anggota keluarganya dalam masyarakat secara luas. Istilah "perlindungan sosial" juga sering digunakan sebagai istilah lain yang merujuk pada perlindungan tenaga kerja.
2. Perlindungan teknis mengacu pada upaya yang dilakukan untuk melindungi pekerja dan karyawan dari risiko yang terkait dengan penggunaan peralatan kerja dan pelaksanaan tugas mereka. Perlindungan ini juga dikenal sebagai perlindungan tenaga kerja.
3. Perlindungan finansial melibatkan penyediaan penghasilan yang memadai kepada pekerja dan karyawan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan keluarga, terutama saat mereka tidak dapat bekerja karena keadaan yang tidak dapat mereka kendalikan, seperti kejadian tak terduga. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memberikan keamanan finansial yang lebih baik. Jenis perlindungan ini sering disebut sebagai perlindungan sosial ekonomi.

Pekerja di sektor perawatan kesehatan secara alami menghadapi risiko kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, sehingga mereka membutuhkan perlindungan hukum. Pentingnya manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang efektif dalam konteks ini sangat ditekankan. Pengaturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit (Kemenkes RI, 2007), serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 1087/MENKES/SK/2010 (Indonesia, 2010) tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit. Para petugas kesehatan berdedikasi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Karenanya, hak-hak pasien perlu dilindungi secara memadai, dan rumah sakit sebagai pemberi kerja bagi petugas kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan hal ini. Dalam konteks ini, pemberi kerja, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (Indonesia, 2003), merujuk kepada individu, entitas, atau pihak lain yang mempekerjakan pekerja dan memberikan imbalan berupa gaji atau imbalan lainnya sesuai kesepakatan bersama.

Subsistem Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan kesehatan merupakan komponen penting yang mendukung keseluruhan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Hak atas kesehatan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan, di mana setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kesehatan. Hak kesehatan mencakup hak setiap orang di dunia untuk mencapai keadaan kesehatan yang optimal, serta tanggung jawab individu dalam menjaga kesehatan orang lain. Definisi kesehatan dalam Pasal 1(1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 (Indonesia, 2009b) mencakup aspek fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup secara produktif secara sosial dan ekonomi, dan hal ini dianggap sebagai kekayaan bangsa. Dengan kata lain, masalah kesehatan manusia juga dapat mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi. Subsistem Sumber Daya Manusia Medis bertujuan untuk memastikan distribusi yang merata dan pemanfaatan yang efektif dan efisien dari tenaga medis yang memadai dan berkualitas. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin tercapainya pembangunan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal (Anna Kurniati dan Ferry Efendi, 2012).

Pada bulan Maret 2020, Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) ditunjuk sebagai lembaga resmi untuk melakukan pengujian virus corona (Covid-19). Namun, pemerintah mengakui bahwa terdapat kekurangan pasokan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi petugas kesehatan. APD merupakan perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melindungi petugas medis yang merawat individu yang berisiko terpapar virus corona. APD tersebut hanya dapat digunakan sekali dalam sehari dan memiliki peranan penting dalam perawatan Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP). APD mencakup pakaian pelindung diri, masker N95, pelindung wajah, dan sepatu bot. Terutama bagi staf medis yang bekerja di ruang isolasi, APD harus digunakan dalam sekali pakai setiap kali mereka melakukan kunjungan kepada pasien. Selain itu, mereka juga diharuskan menjalani karantina setidaknya dua kali sehari.

Saat ini, Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh bantuan yang mendesak berupa Alat Pelindung Diri (APD). Sampai saat ini, satu-satunya pihak yang telah mengirimkan bantuan APD ke RSUA adalah Pemerintah Kota Surabaya. Bantuan APD yang diberikan meliputi masker dan pakaian pelindung (Indonesia, 2020).

Kejadian yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebuah contoh kecil yang menggambarkan kurangnya kesadaran tentang pentingnya Alat Pelindung Diri (APD) di rumah sakit, termasuk bagi dokter jaga. APD memainkan peran yang penting dalam perlindungan teknis bagi tenaga medis, dan rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pasokan APD yang memadai, sementara tenaga medis diwajibkan untuk menggunakannya. Kurangnya ketersediaan APD yang memadai tidak hanya mengancam keselamatan petugas kesehatan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi interaksi antara petugas kesehatan dan pasien.

Penulis telah merumuskan pertanyaan yang berfokus pada hak-hak tenaga kesehatan dalam hal perlindungan hukum dan jaminan kerja di Indonesia. Penulis berencana melakukan survei untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu terkait dengan hak-hak tenaga kesehatan dalam konteks perlindungan hukum dan jaminan kerja. Survei ini diharapkan akan memberikan informasi yang lebih komprehensif dan membantu penulis memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu tersebut.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dan hukum, serta menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi. Pemilihan pendekatan preskriptif disebabkan oleh adanya pembatasan penelitian empiris yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui tinjauan literatur yang relevan. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data dan mengatasi tantangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

# Konsep Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Tenaga

**Kesehatan**

Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang melekat pada mereka sejak lahir, termasuk hak untuk hidup, hak atas perlindungan, hak atas kebebasan, dan hak-hak lainnya. Hak-hak ini merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari setiap manusia. Sebagai makhluk yang diciptakan, setiap manusia dilahirkan dengan hak-hak ini. Prinsip yang menjadi dasar hak-hak ini adalah bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan, termasuk dalam lingkungan negara atau pemerintahan tempat mereka tinggal.

Dalam lingkup nasional, pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga dan melindungi hak-hak warganya. Sebagai negara, ada kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara. Artinya, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara, termasuk melindungi mereka dari ancaman terhadap kehidupan, integritas, dan hak-hak lainnya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun dan mempertahankan sistem hukum yang adil, memberikan keamanan, serta melindungi hak asasi manusia setiap individu. Dalam rangka melindungi hak-hak ini, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tepat, seperti menerapkan kebijakan, undang-undang, dan mekanisme yang efektif, guna memastikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak individu. Upaya ini sangat penting agar setiap warga negara dapat hidup dengan aman, nyaman, dan memperoleh martabat kemanusiaan serta perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak individu dan memastikan keberlanjutan martabat manusia. Teori perlindungan hukum menyoroti signifikansi penerapan hukum oleh lembaga negara sebagai cara untuk melindungi martabat manusia. Prinsip ini mencerminkan tanggung jawab utama pemerintah atau lembaga negara dalam menjaga martabat manusia melalui pemanfaatan hukum. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga negara untuk memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak individu, serta menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu dalam masyarakat. Prinsip perlindungan martabat manusia yang diusung oleh teori perlindungan hukum menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan individu, dan pencegahan diskriminasi serta penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, lembaga negara seperti kepolisian, lembaga peradilan, dan lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan fungsi perlindungan ini.

Dengan menjalankan hukum secara adil dan konsisten, lembaga negara dapat memperkuat perlindungan terhadap martabat manusia dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Hukum memiliki peran sentral dalam menerapkan nilai-nilai keadilan, memelihara ketertiban, dan melindungi hak-hak individu dari pelanggaran. Teori perlindungan hukum menyoroti pentingnya peran hukum dalam melindungi hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin keadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat yang sangat penting dalam menjaga martabat manusia dan menegakkan keadilan (Noor Rahmah et al., 2021).

Perlindungan hukum merupakan hak yang melekat pada setiap warga negara dan merupakan tanggung jawab utama negara sebagai negara berdasarkan hukum. Di Indonesia, pentingnya perlindungan hukum bagi semua individu diakui dan diberikan prioritas yang tinggi. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah melindungi kepentingan individu dengan memberdayakan mereka untuk bertindak dan menggunakan hukum sebagai sarana untuk melindungi hak-hak mereka. Sebagai lembaga yang berwenang, negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi warganya. Perlindungan hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kepentingan individu dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu dalam mengakses keadilan. Hal ini juga mencerminkan salah satu tujuan hukum yang penting, yaitu perlindungan masyarakat (Hadjon, 2007)

Keberadaan aturan hukum yang jelas dan dapat diprediksi menjadi sangat penting dalam menjaga perlindungan hukum. Kepastian hukum memainkan peran krusial dalam menciptakan kepercayaan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan individu untuk beraktivitas dengan keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan keadilan akan ditegakkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum sebagai hak yang mutlak memiliki peran sentral dalam sistem hukum Indonesia. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan terlaksananya perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, sehingga kepentingan individu diakui, dilindungi, dan kepastian hukum tercapai dalam masyarakat (Hadjon, 2007).

Menurut R. La Porta, negara memberikan perlindungan hukum dengan cara yang melibatkan dua aspek utama, yaitu pencegahan (preventif) dan sanksi (punitif). Lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lainnya berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, seperti menyusun aturan yang jelas dan memberikan perlindungan terhadap pelanggaran tersebut. Salah satu contoh perlindungan hukum preventif adalah adanya peraturan yang melarang tindakan tertentu dan menetapkan tanggung jawab serta kewajiban bagi individu atau entitas.

Perlindungan hukum juga mencakup tindakan punitif yang melibatkan pemberian sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran aturan yang telah terjadi. Lembaga penegak hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian, memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa secara hukum dan memberikan sanksi atau hukuman kepada pelanggar. Selain itu, perlindungan hukum juga melibatkan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum. Proses pengadilan dan penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, termasuk memberikan hak-hak individu untuk membela diri, mendapatkan keadilan yang objektif, dan memastikan proses hukum yang adil. Secara keseluruhan, perlindungan hukum melibatkan tindakan preventif dan punitif yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, serta prosedur-prosedur yang dijalankan untuk memastikan keadilan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak individu dan memastikan bahwa aturan-aturan yang telah ditetapkan ditegakkan dengan adil dan setara. Tujuan dan pelaksanaannya antara lain sebagai berikut (Kurniawati & Yunanto, 2022):

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
2. Memberikan hak dan kewajiban
3. Menjamin hak-hak pra subyek hukum.
4. Menegakkan peraturan melalui:
5. Hukum administrasi negara memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak melalui proses perizinan dan pengawasan.
6. Hukum pidana bertujuan untuk menangani setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan melalui penerapan sanksi hukum dalam bentuk pidana dan hukuman.
7. Hukum perdata berperan dalam mengembalikan hak-hak yang terganggu melalui kompensasi atau penggantian kerugian.

Menurut Muchsin perlindungan hukum pada umumnya di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut: (Rochayati, Sukma; Khisni et al., 2017).

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif,

Perlindungan hukum preventif melibatkan memberikan kesempatan kepada badan hukum untuk mengajukan keberatan dan pendapat sebelum keputusan pemerintah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan yang mungkin timbul akibat keputusan tersebut. Perlindungan hukum preventif memainkan peran yang penting dalam tindakan negara. Dalam kerangka peraturan yang ada, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk berhati-hati dalam membuat keputusan yang melibatkan diskresi.

1. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan negara berdasarkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini muncul sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan dan posisi pemerintah dalam hubungan dengan masyarakat, terutama dalam sejarah Barat. Prinsip dasar perlindungan hukum terhadap tindakan negara juga relevan dalam konteks negara hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi sangat penting, dan pelanggaran hak asasi manusia dianggap sebagai pelanggaran serius yang bertentangan dengan tujuan negara hukum.

Perlindungan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini memiliki peranan penting dalam memengaruhi tindakan pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan untuk mengambil tindakan hukum. Sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif, negara memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan dengan hati-hati dan mempertimbangkan implikasi yang mungkin timbul. Perlindungan hukum preventif tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang melarang pelanggaran dan memberikan batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Di sisi lain, perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran hukum. Ini merupakan bentuk perlindungan yang paling tinggi, di mana hukuman diberlakukan sebagai konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan (Prakoso, 2017).

Perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara Indonesia didasarkan pada prinsip pengakuan dan perlindungan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila (Taufiqurrohman, 2021). Prinsip ini menegaskan bahwa semua hak yang diakui secara hukum harus dilindungi, dan berbagai bentuk perlindungan hukum ditegakkan melalui undang-undang. Menurut Teguh Prasetyo, teori keadilan bermartabat tidak hanya mempertimbangkan sistem hukum positif Indonesia secara terisolir, tetapi juga mengakui bahwa hukum ada di mana-mana dalam masyarakat (Prakoso, 2017). Ia juga menekankan bahwa sistem hukum Pancasila adalah kepunyaan bangsa Indonesia sendiri dan merupakan bagian dari warisan peradaban dunia. Sistem hukum Pancasila dianggap asli dan orisinal, sering kali disebut sebagai sistem hukum asli yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia (Prasetyo, 2014).

Dalam mengembangkan asas-asas perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, proses tersebut dimulai dengan menjelaskan konsep dan deklarasi hak asasi manusia. Pancasila berperan sebagai landasan ideologis dan filosofis bagi negara Indonesia. Pengakuan terhadap harkat dan martabat bangsa Indonesia bukanlah hasil perjuangan yang berlangsung dalam jangka waktu lama, tetapi merupakan bagian integral dari Pancasila dan tercermin dalam prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya (Armeilia, 2021).

1. **Upaya Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak untuk Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan**

Tujuan perlindungan hukum adalah melindungi hak-hak saksi dan korban kejahatan serta menciptakan rasa aman. Dalam konteks perlindungan hukum bagi korban kejahatan, terdapat berbagai bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh masyarakat, termasuk reparasi, kompensasi, serta pelayanan dan bantuan medis (Aris Prio Agus Santoso, 2020). Dalam hal perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 27(1) (Indonesia, 2009b) menegaskan hak mereka untuk menerima kompensasi dan perlindungan hukum saat menjalankan tugas profesional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Indonesia, 2014), dalam Pasal 57a, juga memberikan hak perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan, yang berlaku dari awal hingga akhir pelaksanaan tugas sesuai dengan standar profesi dan pelayanan. Standar, prosedur, dan operasi profesional memiliki peran penting dalam menjalankan tugas dengan baik.

Peraturan yang disebutkan memberikan pemerintah kekuatan hukum untuk mendukung perlindungan bagi tenaga kesehatan, terutama dalam menghadapi penyebaran cepat COVID-19. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi pandemi dan melindungi hak-hak tenaga kesehatan melalui penyediaan pelayanan, kompensasi, dan jaminan keselamatan dalam layanan medis. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 6 Keputusan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Kesehatan (Lestari, 2023). Terkait dengan pandemi COVID-19 yang telah dianggap sebagai bencana setelah Keputusan Direktur BNPB Nomor 13A Tahun 2020 (BNPB, 2020), pemerintah di semua tingkatan harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan perlindungan dan pelayanan yang optimal bagi tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan dalam menangani pandemi ini.

Kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Pemerintah ini, termasuk:

1. Mendukung ketersediaan peralatan kesehatan di lapangan
2. Menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis.
3. Transparansi informasi informasi kepada public.
4. Pengambilan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi.

Keselamatan kerja tenaga kesehatan sangat penting, terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Namun, seringkali mereka menghadapi kendala dalam memperoleh hak-hak yang seharusnya terpenuhi, seperti ketersediaan alat pelindung diri (APD). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan petugas kesehatan yang menangani wabah COVID-19 dengan menyediakan APD yang sesuai. Secara hukum, petugas kesehatan memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi diri sendiri. Mereka berhak bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat, termasuk melalui penggunaan APD yang tepat. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan ketersediaan dan aksesibilitas APD yang memadai untuk melindungi tenaga kesehatan dari risiko infeksi dan penyebaran penyakit. Ketika hak-hak tenaga kesehatan tidak terpenuhi, misalnya jika tidak ada atau kurangnya APD, ini dapat menjadi pelanggaran hukum dan melanggar prinsip-prinsip perlindungan hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi tenaga kesehatan serta memperhatikan kebutuhan mereka dalam melaksanakan tugas dengan aman dan efektif.

Melaksanakan standar perlindungan yang mencakup ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja (K3), serta jaminan sosial bagi tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan mereka. Perlindungan ketenagakerjaan meliputi aspek seperti upah, jam kerja, waktu istirahat, dan hari libur. Sementara itu, perlindungan K3 berfokus pada pencegahan cedera dan penyebaran penyakit di tempat kerja, termasuk langkah-langkah yang relevan untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Selain itu, perlindungan jaminan sosial melibatkan partisipasi tenaga kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program ini memberikan perlindungan dalam hal akses ke layanan kesehatan yang dibutuhkan. Selain itu, melalui program BPJS Ketenagakerjaan, tenaga kesehatan juga mendapatkan perlindungan berupa santunan dan jaminan kematian.

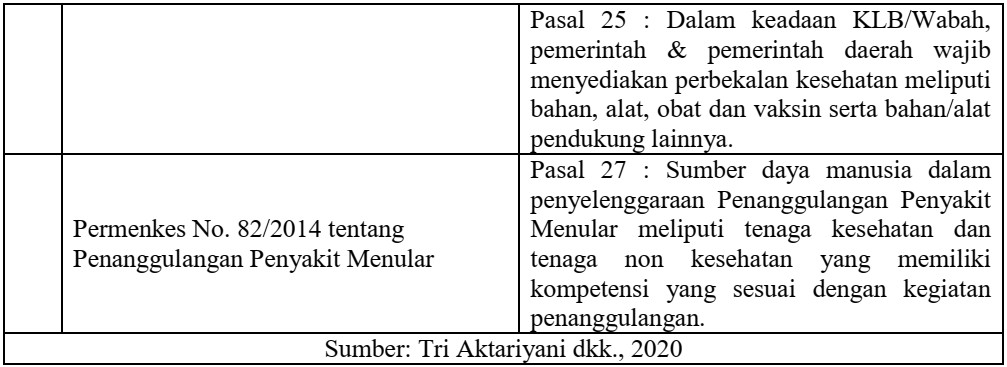
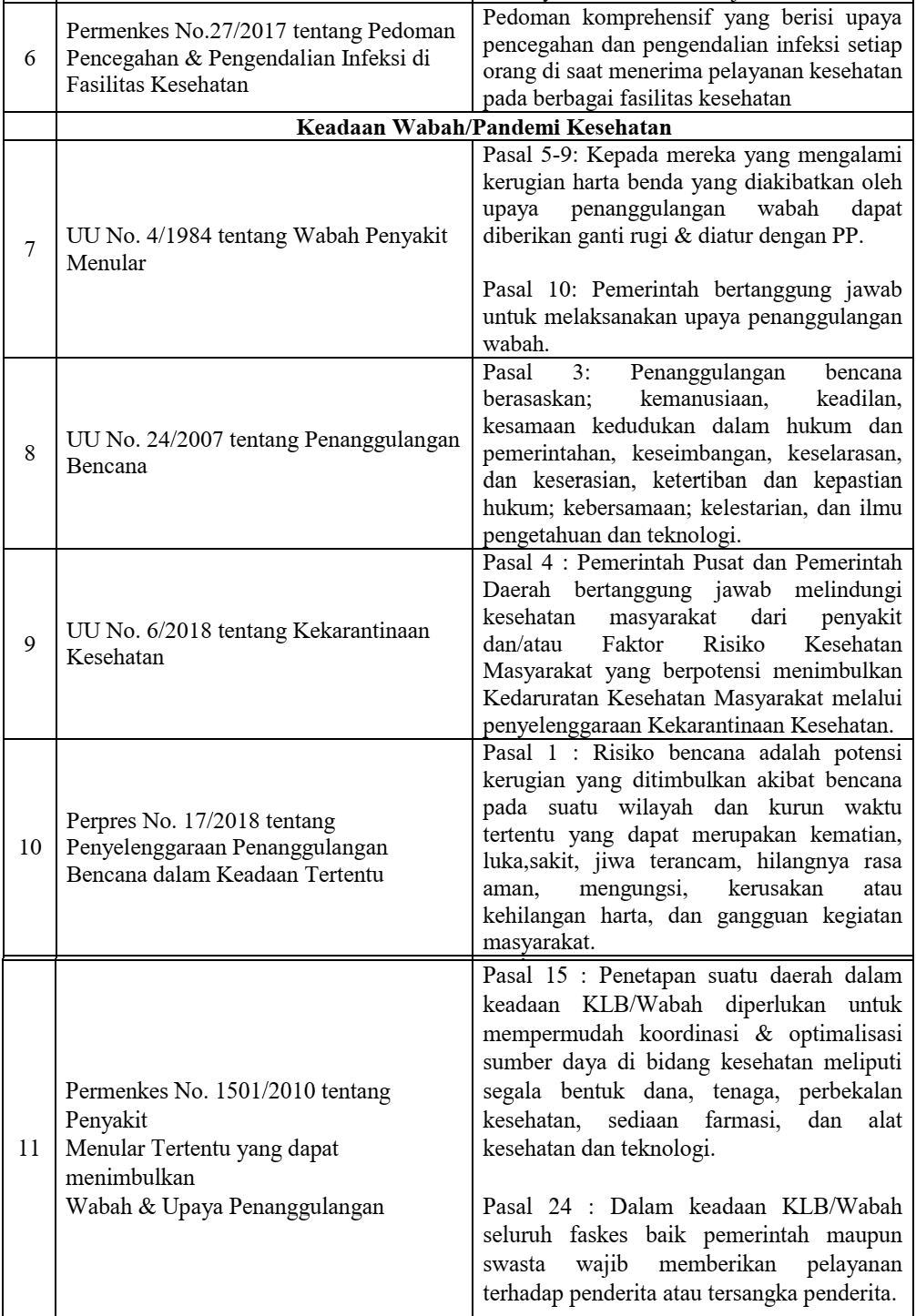
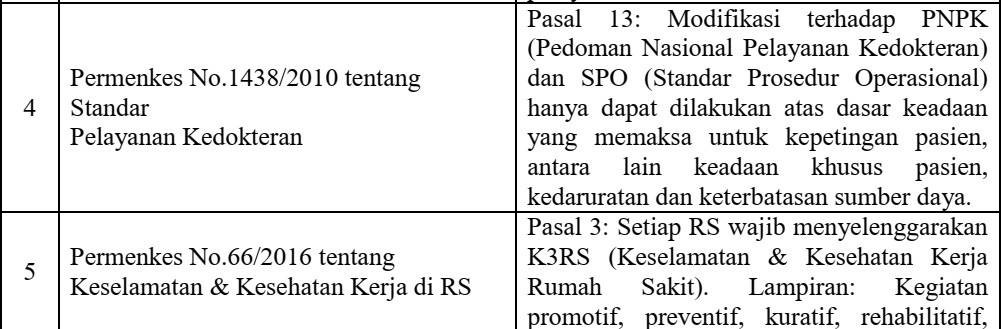
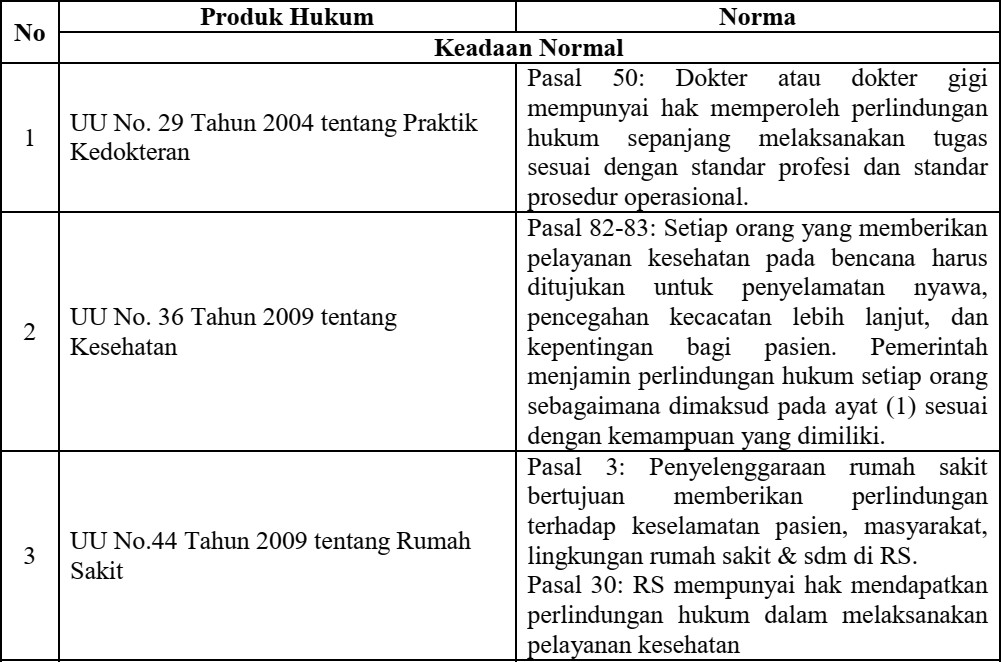
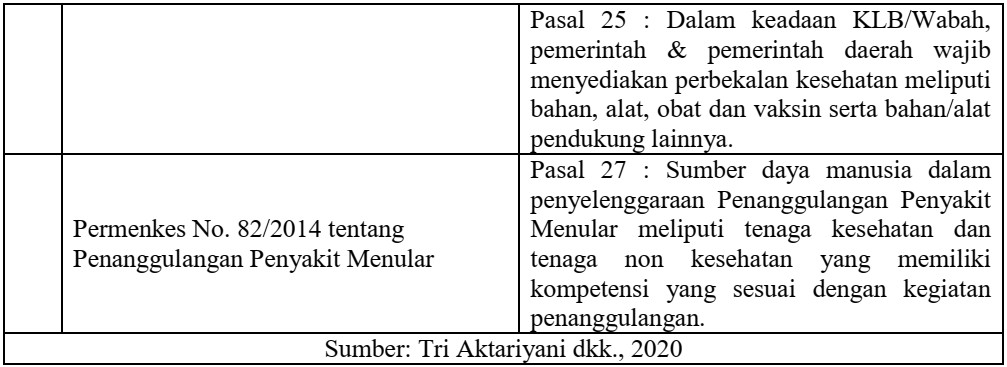
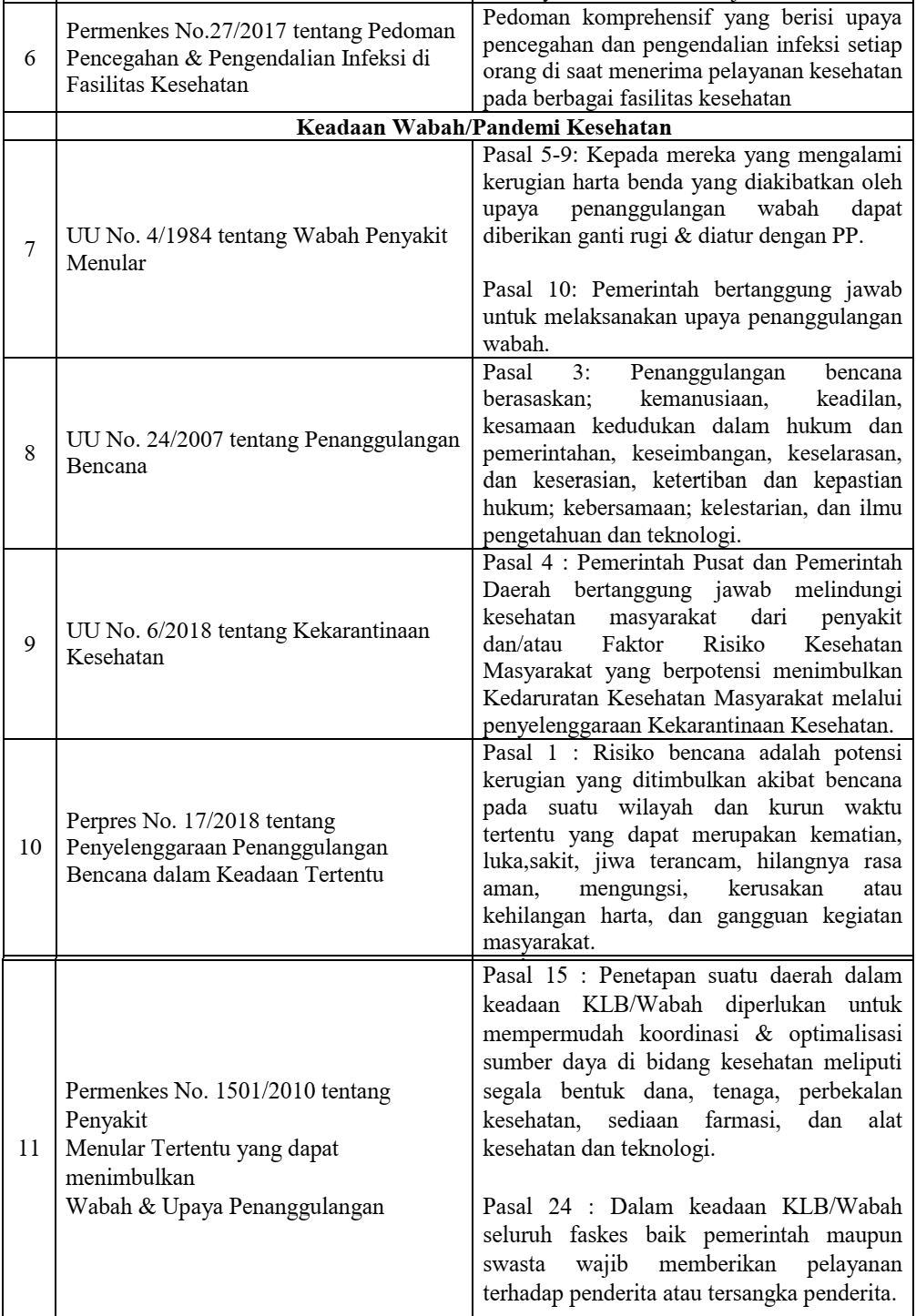
Sebagai contoh, jika ada seorang tenaga medis atau dokter yang terinfeksi COVID-19 dan membutuhkan perawatan, biaya perawatan dan pengobatan terkait COVID-19 akan ditanggung oleh Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Pedoman Teknis Klaim Penggantian Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang Menyediakan Layanan COVID-19.

Segala aspek perlindungan tersebut memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa tenaga kesehatan dapat memperoleh akses yang memadai terhadap perlindungan dan layanan kesehatan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam menghadapi risiko tinggi seperti pandemi COVID-19. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk menerapkan dan memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan ini dengan tujuan menjaga kesejahteraan dan keselamatan para tenaga kesehatan. Adapun ketentuan norma-norma tersebut antara lain diatur pada:

# Tabel 1.

**Produk Hukum Tentang Perlindungan Hukum Tenaga**

# Kesehatan



Perlindungan standar bagi tenaga kesehatan harus mencakup tiga aspek penting, yakni perlindungan standar ketenagakerjaan, perlindungan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta perlindungan standar jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan standar ketenagakerjaan meliputi sejumlah hal, seperti jaminan upah yang adil, pembatasan jam kerja yang wajar, waktu istirahat yang memadai, dan hak untuk memiliki hari libur. Semua aspek ini bertujuan untuk memastikan adanya kondisi kerja yang layak bagi tenaga kesehatan.

Perlindungan standar K3 memiliki peran krusial dalam menjaga keselamatan para tenaga kesehatan. Khususnya dalam situasi pandemi COVID-19, perlindungan ini melibatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran penyakit di tempat kerja. Pemerintah dan lembaga terkait bertanggung jawab untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) yang memadai, menerapkan protokol kesehatan yang sesuai, serta memberikan pelatihan dan informasi yang diperlukan untuk menjaga keselamatan para tenaga kesehatan. Perlindungan standar jaminan sosial bagi tenaga kerja melibatkan partisipasi mereka dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, sehingga mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Selain itu, tersedia juga perlindungan berupa jaminan kematian dan santunan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam situasi di mana seorang tenaga medis atau dokter terinfeksi COVID-19 dan membutuhkan perawatan, biaya perawatan dan pengobatan terkait COVID-19 akan ditanggung oleh Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Pedoman Teknis Klaim Penggantian Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang Menyediakan Layanan COVID-19 (Indonesia, 2021).

Dengan mengadopsi standar perlindungan yang komprehensif ini, diharapkan tenaga kesehatan dapat bekerja dalam lingkungan yang aman, dilindungi, dan mendapatkan dukungan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sangat penting, terutama dalam situasi yang penuh ancaman seperti pandemi COVID-19. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan implementasi dan pemenuhan standar perlindungan ini untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan para tenaga kesehatan. Hak-hak tenaga kesehatan juga dijamin oleh Undang-Undang Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik profesional mereka, berhak:

1. Memiliki hak atas perlindungan hukum dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi dan pelayanan yang berlaku.
2. Mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarga mereka.
3. Menerima imbalan atau upah sesuai dengan jasa yang diberikan.
4. Memperoleh perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, serta diperlakukan dengan hormat, martabat, moralitas, kesopanan, dan nilai-nilai agama.
5. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi mereka.
6. Tidak menghadapi penolakan klaim dari penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar layanan, prosedur operasional, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memperoleh hak-hak lain yang diatur oleh undang-undang.

Untuk menjaga dan melindungi hak-hak tersebut, pemerintah dan lembaga terkait harus menjamin dan memastikan pemenuhan standar profesional dan etika yang berlaku, serta menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan agar petugas kesehatan dapat menjalankan tugas mereka dengan profesional, aman, dan efektif. Pasal 57 UU Praktisi Kesehatan menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerjaan petugas kesehatan dalam melaksanakan tugas mereka. Mereka memiliki hak untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja saat memberikan layanan medis. Namun, selama pandemi COVID-19, banyak petugas kesehatan yang telah mengorbankan nyawa mereka dalam upaya menangani penyebaran virus, bahkan ada yang meninggal akibat terinfeksi. Hal ini mengungkapkan tingkat risiko yang sangat tinggi yang dihadapi oleh petugas kesehatan saat melaksanakan tugas mereka. Mereka berupaya melindungi dan merawat pasien mereka, namun pada saat yang sama, mereka sendiri terpapar virus dan menghadapi ancaman yang fatal. Situasi ini menyoroti perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat dan langkah-langkah yang lebih baik untuk memastikan keselamatan dan kesehatan petugas kesehatan selama pandemi.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan upaya serius untuk memastikan bahwa petugas kesehatan dilengkapi dengan perlindungan diri yang memadai, termasuk melaksanakan regulasi yang ketat terkait protokol kesehatan. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap peran penting petugas layanan kesehatan serta mengakui dan menghargai upaya mereka dalam menghadapi pandemi ini. Kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sangat diperlukan dalam melindungi hak-hak petugas kesehatan dan memastikan keselamatan mereka. Hanya melalui upaya bersama, kita dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi petugas kesehatan yang telah berjuang untuk melindungi kita semua selama pandemi COVID-19.

# Penutup

**Kesimpulan**

Setiap warga negara memiliki hak yang tidak dapat disangkal untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak tersebut dipenuhi. Di Indonesia, sebagai negara berdasarkan hukum, prinsip-prinsip Pancasila dan negara berdasarkan hukum diakui dan dihormati dalam upaya melindungi martabat manusia. Selama pandemi COVID-19, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan melibatkan tindakan pencegahan dan penegakan hukum. Pemerintah telah mengambil langkah pencegahan dengan melaksanakan program vaksinasi bagi petugas kesehatan, dengan tujuan melindungi mereka dari risiko infeksi COVID-19. Selain itu, tindakan penegakan hukum dilakukan dengan memberikan sanksi kepada individu atau kelompok yang melakukan kekerasan atau diskriminasi terhadap petugas kesehatan yang sedang menjalankan tugas mereka.

Regulasi yang mengatur perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak keselamatan kerja petugas kesehatan antara lain adalah Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2016 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit. Petugas kesehatan diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan kerja yang tercantum dalam Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017. Langkah-langkah ini dilaksanakan dalam rangka menangani peningkatan pandemi COVID-19. Adanya komitmen yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku bertujuan melindungi dan menjamin keselamatan kerja petugas kesehatan yang sedang berjuang dalam menangani pandemi COVID-19. Upaya ini dilakukan guna menjaga hak-hak mereka dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

# Saran

Penulis merekomendasikan langkah-langkah tambahan dari pemerintah guna memperkuat institusi kebijakan publik terkait penanganan pandemi COVID-19. Salah satu langkah yang disarankan adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan alokasi dana untuk tenaga kesehatan. Dengan memastikan transparansi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa tenaga kesehatan menerima pembiayaan yang cukup untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Selain itu, penulis juga mendorong pemerintah untuk mengembangkan peraturan khusus yang secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Peraturan tersebut harus memberikan jaminan dan perlindungan yang jelas terhadap hak-hak tenaga kesehatan, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Rumah sakit juga diminta untuk secara konsisten menerapkan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, termasuk dalam aspek sosial, teknis, dan ekonomi. Penting bagi rumah sakit untuk memiliki tim manajemen K3RS yang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dengan keberadaan tim ini, rumah sakit dapat memastikan bahwa standar keselamatan dan kesehatan kerja diikuti dan diterapkan secara efektif.

Dalam hal lain, petugas kesehatan juga memiliki kewajiban untuk mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta melindungi baik diri mereka sendiri maupun pasien yang mereka tangani. Selain itu, petugas kesehatan diharapkan untuk mematuhi peraturan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau institusi tempat mereka bekerja. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa tenaga kesehatan memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan bekerja dalam lingkungan kerja yang aman. Mereka juga diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas mereka secara optimal dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19.

# DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam. (2002). *Hukum Ketenagakerjaan*. Restu Agung.

Anna Kurniati dan Ferry Efendi. (2012). *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia* (Salemba Me).

Aris Prio Agus Santoso, dan T. S. W. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum* (Pustaka Ba).

Armeilia, D. (2021). Perlindungan Hukum Dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, *13*(2), 303. https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.4480

BNPB. (2020). Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun2020. In *Hukumonline.Com* (pp. 1–2). https://bnpb.go.id/berita/keputusan-kepala-badan-nasional-penanggulangan-bencana-nomor-9a-tahun-2020

Hadjon, F. M. (2007). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan administrasi). *Peradaban*.

Indonesia. (2003). *Undang - Undang RI No 13 Pasal 1 Ayat 2 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU\_13\_2003.pdf

Indonesia. (2009a). Undang-Undang no. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. In *Undang-Undang Republik Indonesia* (Vol. 1, p. 41). https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu0442009.pdf

Indonesia. (2009b). Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. In *Undang-undang Tentang Kesehatan* (Vol. 2, Issue 5, p. 255). https://rskgm.ui.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/07.-Nomor-36-Tahun-2009-Tentang-Kesehatan.pdf

Indonesia. (2010). *KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA No. 1087 Tentang Standar K2 Rumah Sakit.pdf*. https://perizinanrealestate.files.wordpress.com/2017/03/kmk-no-1087-ttg-standar-kesehatan-dan-keselamatan-kerja-di-rs.pdf

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38770

Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Pedoman Teknis Klaim Penggantian Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang Menyediakan Layanan COVID-19*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/229596/PERBUP NO 18 TAHUN 2021.pdf

Indonesia, C. (2020). *RS Unair Kekurangan APD untuk Medis Tangani Corona*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200317055432-20-484053/rs-unair-kekurangan-apd-untuk-medis-tangani-corona#

Kemenkes RI. (2007). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 432/Menkes/Sk/Iv/2007. In *Pedoman Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Di Rumah Sakit* (p. 15). http://kebijakankesehatanindonesia.net/sites/default/files/KMK 432-2007 K3 RS.pdf

Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ius Constituendum*, *7*.

Lestari, N. D. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. *Populika*, *11*(1), 50–56. https://doi.org/10.37631/populika.v11i1.759

Noor Rahmah, A., Ridha, M. R., & Kamriani, N. (2021). the Impact of Job Creation Act Against the Participatory Principle in Environmental Law. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, *1*(1), 22–28. https://doi.org/10.51749/injurlens. VII1.3

Prakoso, A. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (LaksBang).

Prasetyo, T. (2014). MEMBANGUN SISTEM HUKUM PANCASILA YANG MERDEKA DARI KORUPSI DAN MENJUNJUNG HAM. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1). https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p19-26

Rochayati, Sukma; Khisni, A., Busyro, A. A., Aminullah, R., Hukum, K. P., Studi, P., Madzhab, P., Hukum, D. A. N., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Negeri, U. I., Hidayatullah, S., Undang-Undang Republik Indonesia, Pusvita, S., Kristiono, N., Rizqy, M. F., Arifin, M., Muh. Nazir, Mathew B. Miles dan Michael Huberman, Muchsin, … Ramadhita, R. (2017). Perlindungan dan Kepastian hukum bagi investor di Indonesia. *Harmony*, *12*(2).

Taufiqurrohman, A. (2021). RELIGIONS IN THE CONSTITUTION OF ASEAN COUNTRIES: The Rule of Law and Welfare Concept. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, *1*(1), 37–46. https://doi.org/10.51749/injurlens. V1I1.5